

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan kehidupan yang lebih layak dan baik pada bidang ekonomi, sosial dan politik, kesejahteraan rakyat sangat dibutuhkan. Namun, kesejahteraan penduduk pedesaan Indonesia masih rendah, dan pertumbuhan ekonomi masih dalam tahap berkembang, sehingga perlu dilakukan peningkatan kesejahteraan penduduk Indonesia melalui pemberdayaan wilayah. Dalam hal menjadi kekuatan potensial untuk mengatasi berbagai masalah struktural baru yang melanda perekonomian Indonesia, pemberdayaan daerah memang memakan waktu lebih lama daripada reformasi pajak dan BUMN Basri (2009).

Pembangunan adalah arah kegiatan kemajuan bangsa, termasuk proses mewujudkan cita-cita nasional dan membangun masyarakat yang kuat serta sejahtera. Salah satunya adalah pembangunan pedesaan yang harus dilakukan secara terencana untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, pembangunan desa harus didasarkan pada potensi dan kelemahan desa. Dalam rangka mewujudkan pembangunan desa diperlukan peran serta partisipasi masyarakat, hal ini dikarenakan masyarakat lebih mengetahui permasalahan dan potensi desa, oleh karena itu dalam hal ini masyarakat merupakan pusat dari proses pembangunan desa itu sendiri Sari (2017).

Dari segi sejarah, jauh sebelum terbentuknya negara bangsa, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan Indonesia, struktur sosial seperti desa dan masyarakat adat telah menjadi pranata sosial dengan status yang sangat penting Widjaja (2010). Hal ini dapat dilihat dari perkembangan desa dan kesejahteraan penduduknya. Seluruh penduduk Indonesia khususnya masyarakat pedesaan mengharapkan untuk mendapatkan penghasilan yang layak dan dapat mengembangkan seluruh potensi desanya agar dapat dimanfaatkan karena penghasilan tersebut merupakan hasil dari sumber daya

dalam desa yang melimpah dan kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi dan jauh dari garis kemiskinan.

Sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak cukup dalam memenuhi kebutuhannya rata-rata dari mereka membuat usaha kecil-kecilan (usaha mikro) untuk menghasilkan pendapatan harian dan memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Usaha yang mereka biasa lakukan seperti pertanian, perdagangan, industri, dan jasa. Tetapi menjalankan usaha tentu bukanlah suatu hal yang mudah, karena sering ditemukan usaha-usaha yang baru berjalan kurang dari satu tahun sudah tutup. Faktor utama dari penyebab itu adalah kurangnya dana atau tidak adanya dana untuk meneruskan dan menjalankan usaha mereka, terlebih lagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini yang dimana terdapat beberapa peraturan yang membatasi kegiatan pelaku usaha Safitri (2020). Sehingga masyarakat memang membutuhkan sumber dana untuk menjalankan usaha atau pekerjaan.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), dibentuknya lembaga BUMDes ini pemerintah mengharapkan dengan adanya BUMDes, masyarakat-masyarakat yang ingin memulai usaha dapat memperoleh bantuan dana dari BUMDes yang ada di desanya. Selain itu pemerintah juga mengharapkan kegiatan ekonomi di masyarakat desa dapat berjalan dan mampu mengembangkan usahanya sesuai dengan karakteristik desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebagai tempat hidup dan penghidupan. Lebih penting lagi, diharapkan desa-desa ini mampu untuk menjadi tumpuan penting bagi kemajuan negara dan bangsa di masa depan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu lembaga usaha desa yang dikelola pemerintahan desa dan masyarakat dalam rangka memperkuat potensi dan perekonomian desa. Hal tersebut tersirat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes perlu memiliki suatu perbedaan

dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini bertujuan agar kinerja dan keberadaan BUMDes dapat memberikan manfaat yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sudah tujuh tahun implementasi UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dengan dana desanya bergulir. Namun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Sukabumi ini umumnya belum berkembang sebagaimana tujuan pembentukannya. Di sisi lain Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi menyebut, dari tahun 2017 hingga 2019 penyertaan modal dana desa kepada BUMDes di Kabupaten Sukabumi mencapai Rp 52,3 miliar sekian yang tersebar di 95 persen lebih desa. Besaran penyertaan modal bervariasi dimana pada tahun berikutnya tidak sebanyak tahun 2017-2019 dikarenakan perencanaan yang belum maksimal.

Kondisi BUMDes Kabupaten Sukabumi berdasarkan tingkat kinerja BUMDes saat ini yang baik atau berkembang hanya berada dibawah 10 persen dari 381 desa. Selain itu terdapat kesulitan dalam mengelola sumberdaya manusia seperti, ketika kepala desa menetapkan pengelola BUMDes yang tidak mempunyai jiwa kewirausahaan walaupun hal tersebut merupakan hasil dari musyawarah di tingkat desa. Sehingga penyertaan modal dapat digunakan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya perlu dilakukan peningkatan kapasitas pengelola BUMDes dikarenakan dari 381 desa hanya 20 pengelola baru yang sesuai dengan kriteria BUMDes

Kemajuan dari sebuah organisasi atau perusahaan dipengaruhi oleh kinerja pegawai-pegawai yang optimal, kinerja merupakan suatu bentuk perwujudan hasil kerja secara kuantitas dan kualitas yang dilakukan dan dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang mereka telah terima Mangkunegara (2010). Hasil pekerjaan yang telah diberikan itu biasanya digunakan sebagai dasar penilaian pegawai atau organisasi. Kinerja yang baik merupakan salah satu aspek penting bagi organisasi untuk tercapainya tujuan

dari organisasi. Sehingga untuk menghasilkan kinerja yang baik maka harus adanya usaha, dimana hal itu dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an surat Al-ahqaaf ayat 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفِقِيَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan”.

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya, jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi organisasinya maka ia akan mendapat suatu hal yang baik dari hasil kerjanya dan juga dapat memberikan suatu hal yang baik bagi organisasinya. Jadi tidak ada ruginya jika kita melakukan usaha ataupun pekerjaan dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan kinerja yang baik, karena Allah pasti akan membalas usaha dan pekerjaan kita.

Pandemi COVID-19 ini sangat berdampak terhadap dunia ekonomi global. Seluruh negara membuat berbagai kebijakan untuk membatasi pergerakan dan mobilitas masyarakat, namun hal tersebut menyebabkan menurunnya aktivitas ekonomi global termasuk Indonesia Nasution, Erna, & Muda (2020). Distribusi kebutuhan seperti, pasokan komponen industri, bahan mentah, bahan baku, barang modal dari luar negeri juga ikut terganggu. Victoria (2020) mengatakan terdapat penurunan kunjungan turis asing yang terjadi di hampir semua negara di dunia, hal ini disebabkan karena adanya kebijakan pembatasan aktivitas dan karantina wilayah (*lockdown*) yang diterapkan oleh hampir seluruh negara di dunia sehingga aktivitas pada sektor pariwisata global mengalami penurunan yang sangat signifikan. Selain itu permintaan konsumsi dalam negeri mengalami penurunan dan kinerja perekonomian semakin tertekan, hal ini juga dikarenakan adanya pembatasan mobilitas ekonomi masyarakat.

**Tabel 1.1**

**Data Penyebaran Virus COVID-19 di Dunia dan Indonesia**

Sumber: Worldometer dan Bramasta (2020)

Dunia			Indonesia		
Terkonfirmasi	Kematian	Persentas	Terkonfirmasi	Kematian	Persentas
29 juta	928 ribu	3,18 %	218 ribu	8 ribu	3,99%

Penyebaran COVID-19 terus meningkat dari hari ke hari. Dilansir dari data Worldometers, sampai dengan September 2020, jumlah kasus terkonfirmasi mencapai 29 juta kasus dengan kasus kematian mencapai 928 ribu. Bramasta (2020) mengatakan bahwa di Indonesia sampai dengan bulan Juli 2020 telah terkonfirmasi sebanyak 218 ribu kasus dengan kasus kematian sebanyak 8 ribu kasus. Dengan angka tersebut, saat ini Indonesia menempati peringkat 9 di Asia dan 23 di Dunia untuk jumlah kasus COVID-19 terbanyak. Meskipun persentase angka kematian di Indonesia semakin menurun sejak Maret 2020, namun rasio pasien meninggal masih lebih tinggi dari rata-rata dunia. Bramasta (2020), juga mengatakan bahwa hingga bulan September 2020, rata-rata kematian pasien COVID-19 mencapai 3,99 persen, sedangkan angka rata-rata dunia tercatat sebesar 3,18 persen. Dikarenakan penyebaran pandemi yang sangat cepat meluas secara global, penawaran serta permintaan hasil industri untuk kebutuhan domestik dan ekspor ikut terpengaruhi. Selain sektor inti, sektor pendukung seperti, jasa penerbangan, pembiayaan kendaraan bermotor, dan jasa transportasi juga terkena dampak yang signifikan karena meluasnya pandemi tersebut.

Fenomena COVID-19 ini memberikan efek kumulatif dalam aspek kehidupan masyarakat. Dalam aspek kesehatan, penyebaran COVID-19 yang mudah, cepat, dan luas ditambah lagi belum ditemukannya vaksin, obat, serta keterbatasan alat dan tenaga medis, maka akan menciptakan krisis kesehatan Putrad (2020). Sejak diumumkannya kasus positif COVID-19 di Indonesia, pemerintah memutuskan untuk melakukan kebijakan pembatasan kegiatan untuk menekan penyebaran pandemi ini. Langkah untuk melandaikan kurva dari cepat dan luasnya

penularan turut berdampak terhadap aspek sosial dengan meningkatnya angka pengangguran dikarenakan berhentinya aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja di berbagai sektor, tak terkecuali sektor-sektor informal. Dampak dari berhentinya aktivitas ekonomi tersebut terdapat penurunan kinerja dan pertumbuhan ekonomi menjadi lambat bahkan menurun dengan signifikan. Pertumbuhan ekonomi terganggu dikarenakan investasi dan kegiatan ekspor-impor terhambat. Konsumsi masyarakat pun turut terganggu dikarenakan berkurangnya tingkat pendapatan.

Di dalam jurnal penelitiannya Putra D (2020) menjelaskan bahwa tekanan tersebut mulai terasa dampaknya pada kinerja perekonomian triwulan pertama tahun 2020 yang hanya tumbuh 2,97 persen atau pertumbuhan triwulan I terendah sejak tahun 2001. Berdasarkan realisasi tersebut maka proyeksi perekonomian yang semula diharapkan dapat tumbuh dengan basis 2,3 persen di tahun 2020 diproyeksikan akan tumbuh pada kisaran negatif 0,4 persen sampai dengan 2,3 persen dengan kecenderungan lebih rendah dari batas atas. Tekanan tersebut pasti berdampak pada Badan Layanan Umum (BLU) di Indonesia yang saat ini berjumlah 243 satker yang terbagi atas lima rumpun layanan: (1) 105 satker layanan kesehatan; (2) 100 satker layanan pendidikan; (3) 5 satker pengelola kawasan; (4) 8 satker pengelola dana; dan (5) 25 satker layanan barang dan jasa lainnya.

Akan tetapi pada postingan yang di unggah oleh Novri (2020) di situs Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia menyebutkan bahwa walaupun berbagai sektor bisnis sedang lemah-lemahnya terdapat 10,026 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tetap bertahan dan masih melakukan transaksi ekonomi. Selain itu terdapat 74.953 desa telah terbentuk sekitar 51.000 BUMDes di Indonesia. Sebelum adanya pandemi COVID-19 terdapat sekitar 37.000 diantaranya sudah menjalankan usaha atau sudah melakukan transaksi ekonomi.

Belakangan, aktifitas ekonomi sejumlah BUMDes mengalami penurunan. Saat ini (pandemi COVID-19) tinggal 10.026 BUMDes yang masih melakukan

transaksi ekonomi, akan tetapi masih ada BUMDes yang melakukan kegiatan perekonomian meski dalam keadaan yang sangat sulit karena pandemi, 10.026 BUMDes tahan pandemi COVID-19 tersebut merupakan BUMDes yang berdiri atas dasar inisiatif masyarakat yang telah melalui telaah ekonomi dan bisnis, 10.026 yang bertahan ini ternyata semua berdiri atas dasar telaah atas ekonomi dan bisnis yang dilakukan, berbeda dengan BUMDes yang berdiri karena program pemerintah kabupaten, cenderung tidak mampu bertahan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh dari ketidakpastian lingkungan, akuntabilitas, dan pengendalian internal terhadap kinerja organisasi saat pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan prespektif terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang berada di lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Sukabumi.

Penelitian ini merupakan modifikasi penelitian sebelumnya yang dikembangkan oleh Mukti dan Fathmaningrum (2019) tentang pengaruh ketidakpastian lingkungan, akuntabilitas, tekanan eksternal, pengendalian internal, dan komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada organisasi perangkat daerah kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penambahan variabel, penggantian objek, subjek penelitian, dan penggunaan teori dalam penelitian ini. Dalam penelitian yang dimodifikasi ini memiliki satu variabel tambahan yaitu kinerja organisasi, selain itu variabel tersebut akan diuji oleh peneliti dengan tujuan untuk mengetahui adanya kesenjangan antara teori dengan praktik serta fenomena yang terjadi. Dikarenakan masih sedikitnya penelitian yang mengkaji dan membahas kinerja BUMDes dengan ketidakpastian lingkungan, akuntabilitas, dan pengendalian internal pada fenomena pandemi COVID-19 ini, sehingga penelitian ini dapat memotivasi peneliti untuk mengkaji dan meneliti hal terkait lebih lanjut. Teori yang digunakan untuk menjelaskan pengukuran kinerja organisasi adalah Teori Penetapan Tujuan (*Goal Setting Theory*) dan Teori

Kontijensi. Selain itu, subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Pada penelitian yang dimodifikasi ini memiliki satu variabel tambahan yaitu kinerja organisasi. Konsep kinerja (*Performance*) didefinisikan sebagai sesuatu pencapaian atau *degree of accomplishment* Rue dan Byars (1981). Hal ini berarti bahwa, kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana capaian tujuan organisasi didasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Informasi-informasi yang berhubungan dengan kinerja organisasi dapat digunakan untuk mengukur apakah tujuan yang diharapkan sudah sesuai dengan proses kerja yang dilakukan organisasi selama ini. Dalam kenyataannya banyak organisasi yang kurang dan tidak punya informasi mengenai kinerja dalam organisasinya. Kinerja juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan (*Output*) terhadap sumber-sumber yang telah digunakan (*Input*) dalam organisasi.

Melalui latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan, Akuntabilitas, dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Organisasi saat Pandemi COVID-19: Studi Empiris Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Sukabumi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, maka rumusan masalah yang dapat disusun adalah sebagai berikut

1. Apakah ketidakpastian lingkungan berpengaruh negatif terhadap kinerja organisasi?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi?
3. Apakah pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan atas rumusan masalah yang disusun, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji tentang :

1. Pengaruh negatif ketidakpastian lingkungan terhadap kinerja organisasi
2. Pengaruh positif akuntabilitas terhadap kinerja organisasi
3. Pengaruh positif pengendalian internal terhadap kinerja organisasi

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1) Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu BUMDES khususnya kinerja organisasi BUMDES. Selain itu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti tentang Pengaruh ketidakpastian lingkungan, akuntabilitas dan pengendalian internal terhadap kinerja organisasi saat pandemi COVID-19.

#### **2) Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Masyarakat**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam memahami kinerja organisasi BUMDES. Sehingga dapat meningkatkan perkembangan ekonomi desa.

##### **b. Bagi Aparatur Pemerintah Daerah**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparaturnya pemerintah daerah untuk mewujudkan *good governance*, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah dalam membantu meningkatkan kinerja organisasi BUMDes.

##### **c. Bagi BUMDES**

Melalui penelitian ini diharapkan BUMDes mampu membentuk suasana organisasi dan dalam ketidakpastian lingkungan organisasi melakukan penyesuaian terhadap kondisi organisasi lingkungannya dalam hal ini BUMDes saat pandemi

COVID-19. Dalam mewujudkan akuntabilitas BUMDes dapat membuat laporan aktivitas dalam pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka sehingga dapat dipergunakan dalam mengambil keputusan dalam mencapai tujuan BUMDes. Dengan adanya pengendalian internal dapat memastikan organisasi berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyalahi aturan. Sehingga pelaksanaan kegiatan BUMDes saat pandemi COVID-19 masih dapat berjalan dengan baik dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.